

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# DKI Belum Bisa Tarik Dana Formula E

## Gambir, Warta Kota

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bakal menyewa jasa pengacara internasional untuk menarik uang komitmen (commitment fee) balap mobil listrik Formula E sebesar 31 juta poundsterling atau setara Rp 547 miliar (kurs 1 poundsterling = Rp 17.665).

Langkah menyewa pengacara asing ini diungkap oleh Direktur Proyek PT Jakpro, Muhammad Maulana saat ditemui di ruang Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/6).

Maulana mengatakan, pembatalan balap mobil listrik yang sedianya digelar 6 Juni 2020 bukanlah kesalahan DKI Jakarta maupun Formula E Operations (FEO). Kegiatan tersebut batal karena ada pandemi Covid-19 di tingkat global.

Maulana berharap tidak ada penalti atau sanksi bagi DKI. Penalti yang dimaksud adalah pemotongan dana komitmen ketika FEO mengembalikan dana tersebut ke DKI.

"Itu sedang dinegosiasikan, kan beda-beda

tiap negara. Tentu kami berharap tidak ada penalti karena ini force majeure (kejadian luar biasa), bukan kelalaian salah satu pihak," kata Maulana.

"Kalau kelalaian sanksinya penalti, tapi ini kan tidak ada yang lalai karena kami semua sudah siap, tapi ada Covid-19, makanya kami negosiasikan," imbuhnya.

Sebelumnya, rapat kerja dengan Komisi E DPRD, pihak Jakpro mengaku tengah bernegosiasi dengan FEO untuk menarik kembali commitment fee sebesar 31 juta poundsterling yang disetor Pemprov DKI kepada FEO antara tahun 2019 dan 2020.

Dalam rapat tersebut juga terungkap, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah mengucurkan dana sekitar Rp 459 miliar untuk persiapan Formula E yang sedianya digelar 6 Juni lalu.

"Selama ini kami sudah mengeluarkan Rp 459 miliar untuk persiapan infrastruktur dan perizinan," kata Direktur Operasional PT Jakpro Muhammad Taufiqurachman dalam rapat kerja.

Menurutnya, PT Jakpro telah menerima anggaran penanaman modal daerah (PMD) sebesar Rp 767 miliar untuk penyelenggaraan Formula E. Namun anggaran itu berkurang untuk penanganan Covid-19, sehingga anggaran yang diterima Rp 423 miliar.

Namun Taufiqurachman juga menyatakan bahwa com-

mitment fee yang telah disetor akan didedikasikan untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2021.

"Jakpro menegosiasi dengan FEO terkait commitment fee pada Februari lalu. Setelah beberapa kali komunikasi mereka menyepakati bahwa 2020 event ditunda dan untuk commitment fee akan didedikasikan untuk penyelenggaraan 2021," katanya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Achmad Firdaus mengatakan Pemprov DKI telah menandatangani perjanjian dengan FEO untuk penyelenggaraan Formula E selama lima tahun di Jakarta.

Bahkan DKI telah membayar commitment fee kepada FEO sebesar 20 juta poundsterling pada 2019 dan 11 juta poundsterling pada tahun 2020.

## Dihentikan

Dalam rapat, seluruh anggota DPRD yang hadir minta Pemprov DKI menghentikan Formula E, bukan sekadar menunda. Namun PT Jakpro menyatakan bahwa Formula E ditunda hingga 2021. Sampai akhir rapat, tak ada titik temu antara dihentikan atau sekadar ditunda.

Karena tak ada titik temu, Komisi E bakal membawa persoalan pembayaran dana komitmen Formula E ke Badan Anggaran (Banggar). Upaya penarikan dana sebesar itu memerlukan sinergi antara pimpinan DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD).

"Kami rekomendasikan kepada pimpinan Dewan supaya Banggar memanggil TAPD, termasuk BPKD. Kalau memang bisa diselesaikan di sana, nanti bisa selesai, tapi kalau memang harus sampai kepada gubernur akan kami tanyakan," kata Ketua Komisi E, Iman Satria.

"Kami kan punya hak untuk bertanya kepada gubernur, jadi bisa saja (memanggil). Kemudian hasil Banggar nanti juga bisa disampaikan kepada gubernur karena perwakilan (SKPD) dia kan pasti datang," ujar Iman.

"Kalau keinginan hati yah dibatalkan, tapi kan kami harus mempelajari dulu konsekuensi dalam perjanjian itu (antara DKI dengan FEO). Makanya kami minta dievaluasi, nanti dipaparkan kami sikapnya harus gimana," ujarnya.

Iman mengibaratkan balap Formula E di tengah Covid-19 seperti buah simalamaka. Kalau Formula E tetap dilaksanakan, hasilnya belum tentu sesuai harapan yakni menarik wisatawan dan investasi.

Di sisi lain, DKI sangat memerlukan dana yang besar untuk menanggulangi dampak Covid-19.

"Karena itu kami pelajari dulu sejauh apa nanti kalau ada penalti bila dana minta dikembalikan, karena ini nggak gampang. Kami juga mau tanya ke TAPD atau Jakpro, ini masih feasible (layak) atau nggak?" kata Iman. (faf)